

PUBLICIANA

Jurnal Ilmu - Ilmu Sosial Universitas Tulungagung

Birokrasi dan Administrasi Publik
Ishworo Widyanto

Kasus Ambalat Antara Diplomasi VS Konfrontasi,
Suatu Tinjauan Geopolitis
Andri Wahyudi

Analisis Pola Pekerjaan Wanita dan Pengaruhnya
Terhadap Pendapatan Keluarga
Angkasawati

Profesionalisme Manajemen Birokrasi
Dalam Pelayanan Publik
Nunun Nurhajati

Perencanaan Sumber Daya Manusia Sebagai Upaya Untuk
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Di Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia
Laily Purnawati

Peranan Kondisi dan Dampak Pemulung
Dalam Tatahidup Bermasyarakat di Kabupaten
Tulungagung
Slamet Hariyanto

Pelaksanaan Otonomi Dalam Meningkatkan Efektifitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Agus Imam Wijayanto

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Produksi Unggulan
Dalam Rangka Optimalisasi Keuangan Daerah
Muharsono

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG



PUBLICIANA

Volume 2 Nomor 1, Nopember 2009
Halaman 1 – 227

ISSN 1979-0295

-
- Birokrasi dan Administrasi Publik 1 - 33
Ishworo Widyanto (Universitas Tulungagung)
- Kasus Ambalat Antara Diplomasi VS Konfrontasi, Suatu Tinjauan Geopolitis 34 - 55
Andri Wahyudi (Universitas Tulungagung)
- Analisis Pola Pekerjaan Wanita dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Keluarga 56 - 106
Angkasawati (Universitas Tulungagung)
- Profesionalisme Manajemen Birokrasi Dalam Pelayanan Publik 107-130
Nunun Nurhajati (Universitas Tulungagung)
- Perencanaan Sumber Daya Manusia Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia 131-153
Laily Purnawati (Universitas Tulungagung)
- Peran Kondisi dan Dampak Pemulung Dalam Tatanan Hidup Bermasyarakat di Kabupaten Tulungagung 154-175
Slamet Hariyanto (Universitas Tulungagung)
- Pelaksanaan Otonomi Dalam Meningkatkan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 176-204
Agus Imam Wijayanto (Universitas Tulungagung)
- Pemberdayaan Usaha Kecil dan Produksi Unggulan Dalam Rangka Optimalisasi Keuangan Daerah 205-227
Muharsono (Universitas Tulungagung)

KASUS AMBALAT ANTARA DIPLOMASI VS KONFRONTASI, SUATU TINJAUAN GEOPOLITIS

Oleh:

Andri Wahyudi

ABSTRAKSI:

Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan keaneka ragaman masyarakatnya memiliki kompleksitas permasalahan yang mengikuti. Hal ini tidak terlepas dari posisi dan kondisi geografi yang kaya akan berbagai sumber potensi alam dan bersinggungan dengan wilayah beberapa Negara lain (tetangga).

Dalam hal ini Indonesia perlu memiliki prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional dikancah percaturan politik internasional.

Terkait dengan masalah Ambalat ada beberapa hal penting terutama yang menyangkut posisi, kondisi (wilayah) geografi dan existensi Negara Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Nasional sekaligus juga menjaga integritas (keutuhan) wilayah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diantara Negara-negara di dunia.

Kata Kunci: Kasus Ambalat, Tinjauan Geopolitis

PENDAHULUAN

Dalam hubungan dengan kehidupan manusia dalam suatu Negara dalam hubungannya dengan lingkungan alam, kehidupan manusia di dunia mempunyai kedudukan sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai wakil Tuhan (khalifatullah) di bumi yang menerima amanatnya untuk mengelola kekayaan alam. Sebagai hamba Tuhan mempunyai kewajiban untuk beribadah dan menyembah Tuhan sang pencipta dengan penuh ketulusan. Adapun sebagai wakil Tuhan di bumi, manusia dalam hidupnya berkewajiban memelihara dan memanfaatkan segenap karunia kekayaan alam dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan hidupnya. Kedudukan manusia tersebut mencakup tiga segi hubungan, yaitu: hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antar manusia, dan hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya. Bangsa Indonesia sebagai umat manusia religius dengan sendirinya harus dapat berperan sesuai dengan kedudukan tersebut.

Sebagai Negara kepulauan dengan masyarakatnya yang beraneka ragam, Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan dan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategi dan kaya akan sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri Negara.

Dalam pelaksanaan bangsa Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan

regional maupun internasional. Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai maupun internasional. Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara.

PEMBAHASAN

Ambalat, Diplomasi vs Konfrontasi

Ambalat kembali mencuri perhatian. Kapal perang Malaysia berkali-kali melanggar territorial Indonesia dan diusir armada angkatan laut kita. Mencuat pada 2005, mengapa krisis Ambalat kembali terjadi? Apa solusi terbaiknya? Ambalat adalah sebuah gugus pulau disekitar 118.2558 Bujur Timur (BT)- 118.25416 BT dan 2.56861 Lintang Utara (LU)- 3.79722 LU yang terletak di perairan Laut Sulawesi, sebelah timur pulau Kalimantan Timur. Sengketa Ambalat Indonesia-Malaysia menyeruak karena klaim kepemilikan. Pada tahun 2005, krisis Ambalat ditandai dengan show of force kedua angkatan bersenjata, penembakan kapal nelayan kita oleh Malaysia, dan aneka aksi demonstrasi mengecam Malaysia. Ambalat disebut sebagai wilayah Republik Indonesia (RI) sesuai Undang-Undang No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan RI yang telah sesuai dengan konsep Hukum Negara Kepulauan (Archipelagic State). Undang-Undang ini telah diakui dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/ UNCLOS) ditetapkan dalam

Konferensi III PBB di Montego Bay, Jamaika, 10 Desember 1982. konvensi ini kemudian diartifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS.

Malaysia mengklaim Ambalat sebagai wilayah kedaulatannya sesuai dengan peta wilayah yang dibuat Malaysia pada tahun 1979. Peta itu didasarkan pada The Continental Shelf Convention 1958. Peta Laut 1979 tersebut juga telah memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam wilayah Malaysia. Malaysia memberi Ambalat (wilayah XYZ) kepada Shell atas dasar perjanjian bagi hasil (Production Sharing Contract) pada 16 Februari 2005.

1. Masalah Penting

Masalah Ambalat menjadi penting bagi Indonesia kerana setidaknya tidaknya ia mencakup tiga dari empat variabel kepentingan nasional. *Pertama*, dari sisi keamanan nasional, ada masalah penjagaan integritas wilayah nasional yang cukup sensitif. Bagi kaum realisme politik internasional, masalah-masalah keamanan nasional semacam ini justru menjadi fokus utama kebijakan Negara. Pengamat militer, Andi Wijayanto dalam wawancara TVOne (17/5/09) menyatakan, langkah Malaysia sejatinya bisa dimaknai sebagai upaya ingin menguji kedaulatan efektif kita atas Ambalat.

Kedua, ada persoalan citra dan harga diri bangsa karena perasaan terlecehkan sebagai Negara berdaulat dengan maneuver angkatan laut Malaysia. Ini berakumulasi dengan memori kehilangan kita atas Sipadan dan Ligitan, aneka kasus kekerasan pada TKI, klaim

Malaysia atas lagu “ Rasa Sayang “, reog dan batik misalnya. Artinya para patriot dan nasionalis menginginkan bahwa harga diri kita harus tegak sebagai bangsa berdaulat.

Ketiga, ada ancaman bagi kesejahteraan ekonomi karena potensi ekonomi dari minyak Ambalat ditakutkan jatuh ke pihak luar. Pakar ekonomi minyak Dr. Kurtubi pada 2005 menyatakan secara kasar Ambalat memiliki cadangan migas seharga 40 miliar dolar AS. Tentu nilai ini cukup signifikan jika bisa masuk ke kas Negara kita.

Dengan ketiga kepentingan nasional tersebut, maka pilihan instrument politik luar negeri yang tersedia adalah diplomasi atau konfrontasi. Namun diplomasi memiliki beberapa kelebihan. Pertama, pada tataran praktik, secara nyata telah ada upaya diplomasi sejak 2005 yang dijalankan kedua Negara untuk menyelesaikan Ambalat. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono (20/5/09) juga menyatakan perundingan Ambalat masih berlangsung. Artinya pilihan penyelesaian diplomatic adalah yang paling rasional meski harus dikawal.

2. Komunikasi Diplomatik

Penyelesaian diplomatik dimulai dengan pembukaan komunikasi diplomatik Indonesia dengan Malaysia (keterangan pers Departemen Luar Negeri, Jum’at 4 Maret 2005). Malaysia menjawab pada tanggal 25 Pebruari 2005 dengan menyampaikan pandangan mereka bahwa wilayah itu adalah wilayahnya. Presiden SBY kemudian berkomunikasi dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi melalui telepon Senin 8 Maret 2005 sebelum meninjau

Ambalat. Pembicaraan berlangsung konstruktif untuk menyelesaikan masalah dengan baik dan Badawi pun akan mengirimkan Menteri Luar Negeri Malaysia untuk mengunjungi Indonesia.

Diplomasi memasuki babak baru setelah Menlu Malaysia Syed Hamid Albar bertemu dengan Menlu RI Hasan Wirajuda di Jakarta (9/3/2005) bahkan diterima oleh Presiden SBY. Dalam pertemuan antar Menlu telah disepakati bahwa kedua belah pihak akan membentuk tim teknis yang akan melakukan perundingan kearah penyelesaian Blok Ambalat. Pertemuan “penyelesaian diplomasi” pertama dilakukan pada 22 dan 23 Maret 2005. Pertemuan tim teknis Indonesia – Malaysia dilanjutkan di Langkawi pada 25-26 Mei, di Yogyakarta 25-26 Juli, di Johor Baru pada 27-28 September 2005 dan Desember 2005.

Namun hingga 2006 masalah sengketa Blok Ambalat antara Malaysia dan Indonesia masih dalam proses perundingan oleh kedua negara dan belum ada penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua Negara. Dalam pertemuan bilateral antara PM Abdullah Ahmad Badawi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung Negera Tri Arga, Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 12-13 Januari 2006 telah disepakati bahwa sengketa Blok Ambalat akan terus diselesaikan secara perundingan.

Kedua, secara moral penyelesaian diplomasi lebih dipilih karena diplomasi merupakan instrument politik luar negeri yang beradab, murah dan terukur. Konfrontasi dan perang makin banyak dicibir

karena tidak hanya malah tetapi juga karena efek rusaknya yang sulit terkontrol. Yang menyedihkan adalah analisa bahwa dari sisi Alutsista kita akan kalah. Perintah untuk tidak mengeluarkan tembakan dari kapal perang kita tidak mengusir kapal Malaysia cukup bijaksana. Alasan lain, Indonesia dan Malaysia adalah tetangga serumpun yang ada dalam kerangka “ the ASEAN Way “ dalam penyelesaian aneka sengketa yang ada.

3. Fase Diplomasi

Alur penyelesaian diplomatik yang telah disepakati sendiri mencakup dua fase. Fase pertama adalah pembicaraan untuk mengkeksplotasi dan mengetahui posisi masing-masing Negara atas klaimnya di Blok Ambalat. Fase kedua adalah bagaimana kedua Negara bisa menyepakati jalan keluar dari klaim tumpang tindih atas Blok Ambalat. Jalan keluar ini ada tiga alternatif. Satu, Negara yang bersengketa tidak menyepakati solusi dan membiarkan permasalahan ini tidak terselesaikan (baca: mengambang) dengan catatan Negara yang bersengketa menyepakati suatu status quo. Dua, Negara yang bersengketa tidak menyepakati batas, tetapi bersepakat untuk membawa sengketa mereka ke forum penyelesaian sengketa. Alur penyelesaian diplomatic yang telah disepakati sendiri mencakup dua fase. Fase pertama adalah pembicaraan untuk mengeksplorasi dan mengetahui posisi masing-masing Negara atas klaimnya di Blok Ambalat. Fase kedua adalah bagaimana kedua Negara bisa menyepakati jalan keluar dari klaim tumpang tindih atas Blok Ambalat.

Jika diplomasi gagal maka krisis bisa kembali terjadi kapan saja. Konfrontasi akan sangat kontra produktif bagi hubungan bilateral, maupun stabilitas regional ASEAN ke depan. Krisis dan konfontrasi juga akan berakibat perluasan spectrum politik luar negeri tidak lagi semata menjadi pembahasan para elite decision makers tetapi meluas merambah ke wilayah keterlibatan public. Ini tentu saja positif dalam konteks demokratisasi politik luar negeri agar kebijakan yang diambil accountable terhadap rakyat.

Tetapi sayang, mencermati krisis terdahulu, keterlibatan public lebih cenderung mengarah kepada ekspresi emosi, kemarahan, sweeping, ajakan perang, penggalangan sikap, artikulasi kepentingan, maupun aksi yang rasional dan terukur.

Penyelesaian Ambalat membutuhkan tidak hanya tekad dan upaya deplomasi bilateral berkelanjutan tetapi juga sikap saling respek untuk tidak melakukan provokasi. Selagi diplomasi masih bergulir, provokasi dan pelanggaran teritori tentu berbahaya. Bagi Indonesia, diplomasi juga harus dikawal dengan menunjukkan kewibawaan, kekuatan dan ketegasan. Kaum realis mengatakan “ jika ingin damai bersiaplah untuk berperang” (if you want peace, prepare for war).

Tanggapan dan Beberapa Solusi Mengenai Kasus Ambalat

1. Pendahuluan

Malaysia dan Indonesia adalah dua Negara tetangga yang sangat dekat, bukan hanya dari segi letak geografis tetapi dari segi budaya dan asal-usul bangsanya. Akan tetapi, walau serumpun

dengan bahasa yang mirip, hubungan kedua Negara tidak bisa dikatakan selalu rukun dan manis. Sejarah kedua bangsa pernah dihiasi tinta hitam peperangan, yang dikenal dengan Konfrontasi Malaysia Indonesia pada tahun 1962-1965. Beberapa kasus sengketa perbatasan wilayahpun pernah terjadi antara keduanya.

Kasus yang paling baru, dan yang menjadi pembicaraan hangat beberapa bulan belakangan ini adalah sengketa kedua Negara mencapai blok migas di perairan Ambalat di wilayah Sulawesi. Sengketa ini menjadi berita hangat yang menghiasi media massa, di Indonesia khususnya. Melalui tulisan ini kami ingin mencoba melihat bagaimana sengketa ini diselesaikan jika memakai pemikiran Donald W. Shriver dalam bukunya *An Ethics for Enemies: Forgiveness in Politics*, dan tujuh langkah menciptakan perdamaian menurut Glenn Stassen dalam bukunya *Just Peacemaking: transforming initiatives for Justice and Peace*.

2. Pokok Masalah: Perairan Ambalat di Laut Sulawesi

Masalah antara Indonesia dan Malaysia seputar blok Ambalat mengemuka ketika terbetik kabar bahwa pemerintah Malaysia melalui perusahaan minyak nasionalnya, Petronas, memberikan konsesi minyak (*production sharing contract*) kepada perusahaan minyak shell, atas cadangan minyak yang terletak di Laut Sulawesi (perairan sebelah timur Kalimantan). Pemerintah Indonesia mengajukan protes atas hal ini karena merasa bahwa wilayah itu berada dalam kedaulatan Negara Indonesia.

Sebenarnya klaim Malaysia terhadap cadangan minyak di wilayah itu sudah diprotes Indonesia sejak tahun 1980, menyusul diterbitkannya peta wilayah Malaysia pada tahun 1979. Peta tersebut mengklaim wilayah di Laut Sulawesi sebagai milik Malaysia dengan didasarkan pada kepemilikan Negara itu atas pulau Sipadan dan Ligitan sebagai wilayah kedaulatan Malaysia, secara otomatis perairan di Laut Sulawesi tersebut masuk dalam garis wilayahnya. Indonesia menolak klaim demikian dengan alasan bahwa klaim tersebut bertentangan dengan hukum internasional.

Untuk memperjelas pokok permasalahan mengenai sengketa wilayah ini, kutipan dari tulisan Melda Kamil Ariadno, Pengajar Hukum Laut Fakultas Hukum UI, Ketua Lembaga Pengkajian Hukum Internasional (LPHI) FHUI, yang dimuat di Kompas, 8 Maret 2005, dapat membantu.

3. Aksi dan Reaksi yang Ditimbulkan

Walaupun pemerintah Indonesia dan Malaysia berulang kali menegaskan bahwa penyelesaian dengan cara kekerasan bukanlah pilihan yang mau diambil, dan kedua pihak akan mengedepankan dialog melalui jalur-jalur diplomasi, masalah ini berkembang menjadi perdebatan seru karena kedua pihak sama-sama kukuh pada penderiannya. Malaysia melalui Perdana Menteri Abdullah Badawi dan Menlu Syeh Hamid Albar menegaskan bahwa pihaknya tidak alah dalam melakukan uniteralisasi peta 1979, dan bahwa konsesi yang diberikan Petronas kepada *Shell* di perairan Laut Sulawesi berada di

wilayah territorial Malaysia. Sementara pemerintah Indonesia melalui pernyataan yang dikeluarkan Deplu, TNI, maupun presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan melepaskan wilayah itu karena wilayah itu merupakan kedaulatan penuh Indonesia. Tentu hal itu jurubicara TNI AL, Laksamana Pertama Abdul Malik Yusuf mengatakan kepada *Asia Times*, “ We will not let an inch of our land or a drop of our ocean fall into the hands or foreigners”.

Di Indonesia masalah ini kemudian menjadi santapan media massa dan memancing reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat. Sentiment anti-Malaysia dengan slogan “ Ganyang Malaysia “ pun lalu berkumandang. Kedutaan Besar dan Konsulat-konsulat Malaysia tiba-tiba disibukkan dengan aksi unjuk rasa berbagai elemen masyarakat yang mengecam sikap Malaysia itu. Di beberapa daerah aksi tersebut diwarnai dengan pembakaran bendera Malaysia dan penggalangan sukarelawan “ Front Ganyang Malaysia”. Pihak DPR-RI pun bersuara keras meminta pemerintah bertindak tegas atas pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan RI di laut Sulawesi. Di wilayah yang dipersengketakan pun ketegangan-ketegangan terjadi antara tentara Malaysia dengan TNI. TNI menggelar pasukan dan kapal-kapal perangnya di wilayah tersebut, yang dikatakan untuk mengimbangi kapal-kapal perang Malaysia yang sudah lebih dulu ada disana. Bahkan di Pulau Sebatik, yang berbatasan darat dengan Malaysia, TNI dan Tentara Diraja Malaysia saling mengarahkan

moncong senjatanya, dan konon saling ejek pun kerap terjadi. Kapal-kapal perang Malaysia diberitakan mengganggu pembangunan mercusuar di atol Karang Unarang, bahkan sempat menangkap dan menyiksa seorang pekerjanya. Saling intimidasi antara kapal-kapal perang Malaysia dan kapal-kapal TNI AL terjadi tiap hari. Yang paling parah terjadi pada tanggal 8 April 2005, ketika KRI Tedong Naga saling serempet dengan KD Rencong di dekat Karang Unarang.

Insiden *Serempetan* dua kapal perang itu menghangatkan suasana, padahal sebelumnya pada tanggal 22-23 Maret 2005, telah diadakan pertemuan teknis antara perwakilan kedua Negara untuk mencari solusi yang damai. Menlu Malaysia pun telah dibicarakan langkah-langkah diplomasi. Kedua pemerintahan juga sudah sepakat melanjutkan dialog berkala setiap dua bulan.

4. Analisis Masalah: “Forgiveness” dan “Just Peacemaking”

Untuk mencari alternative jalan keluar bagi masalah ini, kami akan memulai dengan bagaimana reaksi sangat keras muncul dari masyarakat Indonesia terhadap isu ini. Padahal di Malaysia, menurut Menlu Malaysia dalam wawancaranya dengan Gatra, masyarakatnya tenang-tenang saja dan menyerahkan persoalan sepenuhnya di tangan pemerintah. Memakai pemikiran Shriver dalam bukunya *An Ethics for Enemies: Forgiveness in Politics*, reaksi keras semacam ini bisa dikatakan sebagai akibat memori kolektif sejarah ‘kekalahan’ Indonesia terhadap Malaysia. Memori masa konfrontasi dengan Malaysia di zaman Sukarno, dan kemudian kekalahan Indonesia dari

Malaysia dalam kasus Sipadan-Ligitan di Mahkamah Internasional, serta merta membangkitkan kemarahan kolektif juga ketika Malaysia diberitakan 'berulah' lagi. Hal ini bisa dilihat dari porsi demikian besar yang diberikan media terhadap masalah ini. Selain itu terlihat juga melalui komentar-komentar yang dilontarkan, bukan hanya oleh masyarakat biasa, tetapi juga oleh para politisi. Banyak yang mendorong pemerintah untuk bersikap keras, bahkan Zaenal Ma'arif, seorang politisi dari Partai Bintang Reformasi (BPR) meminta pemerintahan untuk segera menyatakan perang melawan Malaysia.

Bila ditarik lebih jauh lagi, memori kolektif 'kekalahan' terhadap Malaysia ini bisa dikaitkan juga dengan kenyataan bahwa jutaan orang Indonesia mengadu nasib sebagai pekerja keras rendahan di Malaysia. Rasa rendah diri sebagai bangsa bisa jadi tanda disadari telah tertanam dalam memori kolektif bangsa, sehingga ketika ada gejala sedikit saja, rasa 'terinjak-injak' itu begitu kuat. Namun demikian, kami menyadari juga bahwa untuk menelusuri memori kolektif ini, diperlukan penelitian lanjut yang lebih mendalam. Akan tetapi, dengan memperhatikan gejala-gejala yang ada, yaitu dalam reaksi keras masyarakat Indonesia, setiap kali terjadi 'persinggungan' dengan Malaysia, kami berpendapat bahwa langkah awal untuk menyelesaikan masalah dengan Malaysia untuk jangka panjang adalah dengan menelusuri dan mengungkapkan memori kolektif itu. Tanpa itu dilakukan, hubungan kedua bangsa yang bertetangga dan

bersaudara serumpun ini, akan terus mengalami gejolak seperti yang terjadi belakangan ini.

Selain mencermati reaksi keras masyarakat Indonesia, langkah berikutnya adalah mencermati tindakan Malaysia melakukan klaim atas blok Ambalat ini. Memang informasi yang dapat dikumpulkan tentang hal ini tidak begitu banyak, karena pemerintah Malaysia maupun media Malaysia kelihatannya tidak terlalu membicarakan hal ini dengan terbuka. Akan tetapi, kami tertarik melihat sikap Malaysia yang terlihat begitu enteng dalam melakukan klaim, dan juga begitu yakin akan posisinya.

PM Malaysia ketika ditanya tentang protes Indonesia terhadap klaim Malaysia dengan enteng menyampaikan bahwa konsesi yang diberikan Petronas kepada *Shell* di perairan Laut Sulawesi berada di wilayah territorial Malaysia. “ Petronas pasti mengerti bahwa wilayah itu adalah wilayah Malaysia karena jika itu wilayah orang lain, untuk apa Petronas sampai kesana”.

Malaysia juga begitu yakin dengan pendiriannya menarik batas wilayah dengan memakai asas titik pulau terluar, yang berlaku bagi Negara kepulauan, padahal Malaysia bukan termasuk Negara kepulauan. Bila memakai prinsip ini, maka terlihat bahwa klaim Malaysia tidak hanya akan mencakup perairan Ambalat saja, tetapi bisa jauh masuk ke dalam wilayah perairan antara Kalimantan bagian Timur dan Sulawesi Utara.

Sikap enteng Malaysia ini oleh beberapa pihak diduga karena Malaysia menganggap masalah ini hanya masalah sumber daya alam. Sementara bagi Indonesia sengketa Ambalat bukanlah sekedar sengketa untuk mendapatkan sumber daya alam. Blok Ambalat merupakan wujud dari wilayah kedaulatan Indonesia. Kehilangan blok Ambalat berarti kehilangan sebagian wilayah kedaulatan. Bahkan blok Ambalat bisa menjadi taruhan bagaimana Indonesia mempertahankan kedaulatannya di wilayah yang dipersengketakan oleh Negara lain. Rakyat di Indonesia melihat sengketa blok Ambalat lebih sebagai masalah kedaulatan dan harga diri bangsa ketimbang sekedar perebutan potensi sumber daya alam.

Dengan mengadopsi tujuh langkah penciptaan perdamaiannya Glenn Stassen, apa yang dilakukan Malaysia ini jelas-jelas bukan untuk menciptakan perdamaian. Karena itu adalah tidak ada artinya sama sekali ketika Menlu Malaysia mengatakan bahwa pihaknya siap berunding dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh klaimnya.

Langkah pertama dalam penciptaan perdamaian menurut Stassen adalah menetapkan keamanan bersama (*affirm common security*), dengan membangun tatanan yang damai dan adil bagi semua pihak. Penetapan batas wilayah dengan membuat peta secara sepihak, dengan memakai pertimbangan menurut pengertian sepihak, seperti yang dilakukan Malaysia, adalah tindakan yang bisa dianggap kebalikan dari langkah ini. Penetapan batas wilayah seperti itu justru menggoyahkan keamanan bersama, bahkan menciptakan ancaman

bagi pihak yang lain. Ketika ancaman sudah terjadi, dialog yang mau diadakan pun akan menjadi lebih sulit untuk dijalankan dengan baik. Ini terlihat dalam pertemuan teknis Malaysia-Indonesia membahas masalah Ambalat yang diadakan di Bali tanggal 22-23 Maret lalu. Pertemuan ini berakhir tanpa hasil apa-apa, karena kedua pihak tetap pada pendirian masing-masing.

Karena dalam kasus ini ancaman sudah terjadi, dan tatanan yang damai dan adil digoyahkan, langkah kedua yang dianjurkan Stassen perlu diperhatikan baik-baik. Itu adalah mengambil inisiatif lebih dulu untuk perdamaian (*take independent initiatives*). Dalam kasus ini, pihak yang manakah yang mengambil inisiatif lebih dulu untuk menyelesaikan masalah? Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa telah mengupayakan dialog atas klaim Malaysia ini sejak lama, yaitu sejak tahun 1980, tetapi tidak mendapat tanggapan berarti, sampai kasusnya menjadi besar karena diberikannya konsesi kepada Shell oleh Petronas Malaysia.

Pemerintah Malaysia melalui Menlunya mengatakan bahwa justru Indonesialah yang melakukan inisiatif provokatif, dengan membangun mercusuar di atol Karang Unarang yang diklaim Malaysia sebagai wilayahnya, sedangkan Malaysia selalu siap untuk berunding. Hanya pertanyaan yang diajukan pihak Indonesia adalah berunding dengan kondisi seperti apa? Apakah kondisi memerlukan penguatan *implicit* akan klaim Malaysia lebih dulu (dengan tidak memasuki lagi wilayah yang sudah diklaim Malaysia)? Pemerintah Indonesia

bersikukuh dialog dilakukan dengan tetap membangun mercusuar itu, karena itu termasuk wilayahnya. Jalan tengah yang bisa ditawarkan adalah dengan membiarkan wilayah itu menjadi wilayah tak bertuan untuk sementara, sampai ditemukan titik temu melalui dialog. Namun, melihat perkembangan yang ada sekarang. Kelihatannya pilihan status quo itu juga enggan untuk diterima.

Akan tetapi, ada tiga langkah menurut Stassen, yaitu *Talk to your enemy*. Bicaralah, lakukan negosiasi/perundingan, cari jalan keluar dengan memakai metode-metode penyelesaian konflik tentang hal ini, sudah dilakukan satu kali dan belum berhasil. Namun dijanjikan untuk bertemu kembali bulan Mei, dan kita harus menunggu.

Sambil menunggu, langkah keempat mungkin bisa dilakukan. Itu adalah mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan. Penyelesaian konflik yang sudah terjadi harus mengingat hal ini. Kampanye-kampanye anti Malaysia dengan semangat berperang seperti membentuk Front Goyang Malaysia, merekrut sukarelawan yang siap membela tanah air melawan Malaysia, harus ditinggalkan. Perang hanya akan meninggalkan kesengsaraan. Banyak jiwa yang melayang dan perekonomian Negara pun morat marit karenanya. Yang harus dikampanyekan adalah bagaimana menyembuhkan luka-luka bersama akibat memori kolektif tadi.

Selain itu, satu hal yang harus diperhatikan pemerintah Indonesia adalah meningkatkan perhatiannya terhadap wilayah-wilayah terluar Indonesia. Sudah lama wilayah-wilayah perbatasan

seperti di ujung Barat Sumatera, ujung Utara Sulawesi, ujung Selatan Timor, dan Ujung Timur Papua, menjadi 'anak terlantar'. Perhatian melalui pembangunan fasilitas social bagi masyarakat di wilayah-wilayah ini sangat penting. Sipadan dan Ligitan ditetapkan sebagai wilayah Malaysia oleh Mahkamah Internasional di tahun 1988 juga karena kedua wilayah itu tidak pernah 'disentuh' oleh Indonesia, namun dibangun dan dikelola oleh Malaysia.

Langkah kelima dan keenam, yang menurut kami masih berkaitan erat adalah memutus lingkaran setan kekerasan, turus serta dalam penciptaan perdamaian dan mengakhiri progaganda saling menyalahkan, termasuk memberikan kompensasi/ganti rugi kepada yang dirugikan. Langkah-langkah ini sangat penting, dan dalam kasus Malaysia dan Indonesia, menurut saya kedua bangsa harus menoleh bersama ke belakang, sejarah konflik yang pernah terjadi antara kedua bangsa harus diungkapkan, dan kemudian mencari jalan untuk mengakhiri semua kecurigaan satu dengan yang lain. Kedua langkah ini terkait erat dengan teori Shriver, " mengungkapkan untuk mengingat kejahatan yang sudah dilakukan, dan kemudian mengampuni ".

Kemudian langkah yang terakhir adaah bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan konflik ini dengan transparan dan terbuka. Semua upaya untuk mengungkapkan masalah dilakukan dengan jujur dan terbuka untuk kedua bangsa. Kami tidak setuju dengan pendapat Menlu Malaysia yang mengatakan bahwa masalah ini hanya masalah

teknis sehingga masyarakat Malaysia tidak perlu tahu. Ini hanya urusan dua pemerintah.

Protes negosiasi, kemajuan-kemajuan dan hambatan-hambatannya harus dibuat terbuka kepada publik, sehingga publik bisa turut berpartisipasi dengan menyumbangkan opininya.

5. Penutup

Dengan menerapkan tujuh langkah ini dalam proses perundingan, serta dengan menjalankan juga pengungkapan luka dalam memori kolektif kedua bangsa, masalah sengketa Ambalat ini menurut kami akan bisa diselesaikan dengan lebih menyeluruh. Bukan hanya sekedar menyelesaikan satu kasus yang sekarang saja, tetapi juga meletakkan dasar bersama untuk menghadapi masalah-masalah serupa dimasa mendatang.

Namun demikian, kami menyadari bahwa berteori selalu lebih mudah daripada menerapkan dalam kenyataan. Memakai cara Shriver dan Stassen untuk menyelesaikan sengketa Ambalat juga masih perlu dibuktikan. Akan tetapi, Glenn Stassen menunjukkan keberhasilan teorinya dalam menyingkirkan rudal-rudal balistik di Eropa, karena kami bisa optimis juga, kalau cara ini juga bisa saja berhasil disini.

PENUTUP

Indonesia dan Malaysia adalah dua Negara yang saling berdekatan dan menjalin hubungan bilateral yang sudah berlangsung sejak lama. Meski demikian, antara kedua Negara ini sering terjadi perselisihan, khususnya mengenai permasalahan batas wilayah. Fakta memperhatikan

beberapa pulau yang telah diambil oleh pihak Malaysia dari Indonesia, contohnya seperti Pulau Sipadan dan Ligitan. Dan hingga kini yang menjadi permasalahan terbaru, kedua pihak tersebut sedang memperebutkan satu wilayah yang kaya akan sumber daya minyak. Malaysia mengklaim daerah Ambalat, yang terletak di sebelah timur Pulau Kalimantan Timur tersebut termasuk kedalam kepemilikan wilayahnya. Indonesia yang memiliki bukti kuat atas kepemilikannya, tidak begitu saja menerima pernyataan mentah tersebut. Sehingga hal ini membuat satu hubungan yang kurang baik diantara dua pihak konflik yang ditimbulkan. Dan parahnya, sampai sekarang belum didapatkan jalan keluar yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Dari kesimpulan yang dapat kami kemukakan diatas. Kami mengarahkan agar pemerintah Indonesia dapat lebih tegas dalam menyegarkan permasalahan Ambalat tersebut. Karena hal ini dapat menunjukkan Sistem Geopolitik Indonesia yang kuat kepada seluruh bangsa Indonesia. Indonesia telah merdeka, maka sepatutnya kita menghapuskan segala praktek yang bertautan dengan asas kemerdekaan yang telah direnggut bangsa Indonesia.

Bagi masyarakat Indonesia sendiri, jangan mudah terpengaruh untuk melakukan aksi kekerasan dan tak beretika demi mengungkapkan aspirasinya terhadap berbagai permasalahan yang dimaksud. Kita harus tetap berkepala dingin dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, bukankah itu adalah hal yang paling baik untuk tidak menebar kebencian dan kerusakan dimuka bumi ini. Untuk itu selesaikanlah kasus ini dengan

cara damai mencapai jalan keluar yang paling baik untuk tidak menebar kebencian dan kerusakan dimuka bumi ini. Untuk itu selesaikanlah kasus ini dengan cara damai mencapai jalan keluar yang saling menguntungkan Indonesia dengan Negara serumpunnya, Negeri Jiran Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, 1973, *Tingkah Laku Politik di Asia Tenggara*, Jakarta: LEKNAS/Lipi

Hidayat, I. Mardiyono, 1983, *Geopolitik, Teori dan Strategi Politik Dalam Hubungannya dengan Manusia, Ruang dan Sumber Daya alam*. Surabaya Usaha Nasional.

<http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2009/06/geopolitik.indonesia.html>.

Muhaimin, Yahya, 1983, *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*, Yogyakarta, Gajahmada, University Press.